

IMPLEMENTASI SDGS DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN INOVASI PERDESAAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA BARAT

Tuti Hasanah¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Implementasi SDGs Desa dalam Pembangunan Infrastruktur dan Inovasi Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SDGs Desa Goal 9 dalam pembangunan infrastruktur dan inovasi perdesaan di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Provinsi Jawa Barat. Analisis data menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SDGs Desa Goal 9 telah berjalan melalui mekanisme komunikasi yang berjenjang, dukungan sumber daya, pembagian kewenangan antarinstansi, serta pedoman pelaksanaan yang dituangkan dalam regulasi dan standar operasional prosedur. Namun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi keterbatasan anggaran, disparitas pembangunan wilayah utara dan selatan Jawa Barat, perubahan prioritas pembangunan akibat pergantian kepemimpinan, serta perlunya penguatan koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, implementasi SDGs Desa Goal 9 dalam pembangunan infrastruktur dan inovasi perdesaan pada DPM-Desa Provinsi Jawa Barat telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, SDGs Desa, Infrastruktur Desa, Inovasi Perdesaan, George C. Edward III.

Abstract

The research, entitled “Implementation of Village SDGs in Rural Infrastructure Development and Innovation at the Department of Community and Village Empowerment of West Java Province.” The study aims to analyze the implementation of Village SDGs Goal 9 in rural infrastructure development and innovation in West Java Province. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collection

techniques including interviews, observation, and documentation. The study was conducted at the Department of Community and Village Empowerment (DPM-Desa) of West Java Province. Data analysis is based on George C. Edward III's policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation of Village SDGs Goal 9 has been carried out through a tiered communication mechanism, resource support, the division of authority among institutions, and implementation guidelines established through regulations and standard operating procedures. However, the implementation has not yet been fully optimal due to several challenges, including budget limitation, disparities in infrastructure development between the northern and southern regions of West Java, changes in development priorities due to leadership transitions, and the need to strengthen inter-agency coordination in program implementation. Overall, the implementation of Village SDGs Goal 9 in rural infrastructure development and innovation at the Department of Community and Village Empowerment of West Java Province has been implemented, but it has not yet reached its full potential.

Keywords: Policy Implementation, Village SDGs, Rural Infrastructure, Rural Innovation, George C. Edward III.

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu agenda utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Melalui Agenda 2030, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kerangka pembangunan global yang terdiri atas 17 tujuan dan 169 target. SDGs tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menekankan prinsip pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta melibatkan berbagai aktor pembangunan (Triatmanto, 2021). Berbeda dengan pendekatan pembangunan sebelumnya melalui *Millennium Development Goals* (MDGs), SDGs menempatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan sebagai aktor yang memiliki peran dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

Sebagai bentuk adaptasi terhadap karakteristik pembangunan di Indonesia, pemerintah mengimplementasikan SDGs hingga tingkat desa melalui kebijakan SDGs Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kebijakan tersebut menetapkan 18 tujuan SDGs Desa yang menjadi arah pembangunan desa agar lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan perubahan paradigma

pembangunan desa, dimana desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi aktor yang memiliki kewenangan dalam mengelola potensi serta menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Salah satu tujuan dalam SDGs Desa yang memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan daerah adalah SDGs Desa Goal 9 mengenai pembangunan infrastruktur dan inovasi perdesaan. Infrastruktur memiliki peran strategis dalam meningkatkan konektivitas wilayah, memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa. Selain itu, inovasi perdesaan menjadi aspek penting dalam mendorong kemandirian desa melalui pemanfaatan potensi lokal, pengembangan teknologi tepat guna, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang memiliki tantangan tersendiri dalam implementasi SDGs Desa Goal 9. Dengan jumlah 5.311 desa serta karakteristik geografis yang beragam, pemerintah daerah menghadapi persoalan dalam mewujudkan pembangunan desa yang merata. Meskipun secara umum terjadi peningkatan status perkembangan desa, pembangunan infrastruktur dan inovasi perdesaan masih menjadi tantangan, terutama berkaitan dengan kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Berdasarkan data capaian SDGs Desa, tujuan pembangunan infrastruktur dan inovasi perdesaan di Provinsi Jawa Barat masih menunjukkan adanya ruang perbaikan. Capaian SDGs Desa Goal 9 Jawa Barat tercatat sebesar 43,88 persen berdasarkan data Kemendes PDTT. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan infrastruktur desa belum sepenuhnya optimal. Selain itu, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat tahun 2024, panjang jalan desa di Jawa Barat mencapai 29.148.962 meter, namun masih terdapat jalan desa dalam kondisi rusak berat sepanjang 6.770.598 meter. Data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur desa masih cukup besar.

Permasalahan pembangunan infrastruktur desa juga dipengaruhi oleh kondisi geografis dan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Wilayah

Jawa Barat bagian selatan seperti Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, dan Tasikmalaya memiliki karakteristik wilayah yang lebih sulit sehingga membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur yang lebih besar. Selain itu, pengembangan inovasi perdesaan juga masih menghadapi tantangan dalam hal penyebaran informasi, penguatan kapasitas kelembagaan desa, serta keberlanjutan inovasi berbasis potensi lokal.

Dalam pelaksanaan SDGs Desa Goal 9, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat memiliki posisi strategis sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi pembangunan desa. Namun, DPM-Desa Provinsi Jawa Barat tidak melaksanakan kebijakan secara mandiri. Pelaksanaan program melibatkan pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah teknis, pemerintah desa, hingga masyarakat sebagai pelaksana pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SDGs Desa Goal 9 memiliki kompleksitas birokrasi karena melibatkan berbagai aktor dengan kewenangan dan kepentingan yang berbeda.

Kompleksitas implementasi tersebut menjadikan aspek pelaksanaan kebijakan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program. George C. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut menggambarkan bagaimana suatu kebijakan dapat diterima, dilaksanakan, serta dikelola oleh organisasi pelaksana (Nugroho, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai SDGs Desa lebih banyak membahas implementasi pada tingkat desa sebagai pelaksana langsung program. Sementara itu, kajian mengenai bagaimana pemerintah provinsi berperan sebagai pengarah, koordinator, dan fasilitator dalam implementasi SDGs Desa masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi dalam melihat implementasi SDGs Desa Goal 9 dari perspektif pemerintahan daerah, khususnya bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat menjalankan fungsi koordinasi dalam pembangunan infrastruktur dan inovasi perdesaan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis **Implementasi SDGs**

Desa dalam Pembangunan Infrastruktur dan Inovasi Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III (1980) sebagaimana dikutip oleh Nugroho (2021) bahwa kurangnya perhatian terhadap implementasi adalah persoalan utama dalam administrasi publik (*lack of attention to implementation*), keputusan pembuat kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan sukses tanpa pelaksanaan yang efektif, (*without effective implementation the decision of policy makers will not be carried out successfully*). Terdapat empat aspek utama untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, dan struktur birokrasi.

- 1) Komunikasi (*communication*), mengenai cara kebijakan disampaikan kepada organisasi atau masyarakat, serta reaksi dan sikap dari pihak yang berkepentingan dalam proses tersebut.
- 2) Sumber Daya (*resources*), mengenai ketersediaan sumber daya yang diperlukan, terutama sumber daya manusia, yang mencakup kemampuan para pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif.
- 3) Sikap (*disposition or attitudes*), mengenai kesiapan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan publik. Kemampuan teknis tidak cukup, harus diimbangi dengan integrasi dan dedikasi dalam menjalankan kebijakan.
- 4) Struktur Birokrasi (*bureaucratic structures*), mengenai keselarasan struktur birokrasi dalam menjalankan kebijakan publik. Salah satu hambatannya ialah menghindari terjadinya pemecahan birokrasi (*bureaucratic fragmentation*) yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Teori Edward III dipilih karena mampu menjelaskan secara komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Keempat variabel tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji implementasi SDGs Desa Goal 9 dalam pembangunan infrastruktur dan inovasi perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan telah berjalan serta

melibatkan banyak aktor, sumber daya, serta koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam proses implementasi SDGs Desa Goal 9 dalam pembangunan infrastruktur dan inovasi perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat sebagai instansi yang memiliki peran dalam koordinasi dan fasilitasi pembangunan desa di tingkat provinsi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian (Sugiyono, 2023). Informan penelitian terdiri atas dua orang aparatur DPM-Desa Provinsi Jawa Barat yang terlibat dalam pelaksanaan program, yaitu Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Potensi Desa serta Pelaksana pada Bidang Pengembangan Potensi Desa. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen pendukung penelitian (Hardani, et al., 2020).

PEMBAHASAN

Implementasi SDGs Desa Goal 9 dalam Pembangunan Infrastruktur dan Inovasi Perdesaan pada DPM-Desa Provinsi Jawa Barat

Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Goal 9 di Provinsi Jawa Barat diarahkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas sekaligus mendorong inovasi perdesaan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Provinsi Jawa Barat melalui mekanisme pembinaan,

koordinasi, fasilitasi, serta penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Dalam implementasinya, DPM-Desa tidak berperan sebagai pelaksana pembangunan fisik secara langsung, melainkan sebagai koordinator yang menghubungkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta perangkat daerah teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan *Report Analitik Peningkatan Infrastruktur Desa Tahun 2013–2024* yang disusun oleh DPM-Desa Provinsi Jawa Barat, pembangunan infrastruktur desa menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian SDGs Desa Goal 9. Sejak tahun 2018 hingga 2024, bantuan keuangan infrastruktur terus dialokasikan kepada lebih dari 5.300 desa setiap tahun. Pada tahun 2024, nilai bantuan keuangan infrastruktur desa mencapai Rp434,13 miliar yang dimanfaatkan untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana desa, seperti jalan desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani, drainase, irigasi, sarana air bersih, posyandu, balai kemasyarakatan, serta rehabilitasi kantor desa. Data tersebut menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pemerataan pembangunan desa melalui penyediaan infrastruktur dasar.

Selain pembangunan infrastruktur, implementasi SDGs Desa Goal 9 juga diarahkan pada pengembangan inovasi perdesaan. Pengembangan inovasi dilakukan melalui pemanfaatan potensi lokal, teknologi tepat guna, serta pemberdayaan masyarakat desa untuk menciptakan solusi terhadap berbagai permasalahan pembangunan. DPM-Desa Provinsi Jawa Barat juga memfasilitasi pengembangan inovasi melalui berbagai kegiatan, seperti pembinaan dan penyelenggaraan lomba inovasi desa, sehingga mendorong desa untuk mengembangkan inovasi yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Upaya tersebut menunjukkan bahwa implementasi SDGs Desa Goal 9 tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas desa dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SDGs Desa Goal 9 masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan anggaran menyebabkan pembangunan infrastruktur harus

dilakukan secara bertahap sehingga belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan desa secara bersamaan. Selain itu, masih terdapat kesenjangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, aksesibilitas wilayah, serta besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur. Perubahan prioritas pembangunan akibat pergantian kepemimpinan daerah juga memengaruhi kesinambungan pelaksanaan program, terutama dalam penyusunan kebijakan jangka panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SDGs Desa Goal 9 tidak hanya dipengaruhi oleh tersedianya program pembangunan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi SDGs Desa Goal 9, penelitian ini menganalisis temuan lapangan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur dan inovasi perdesaan di DPM-Desa Provinsi Jawa Barat. Analisis terhadap masing-masing variabel disajikan pada pembahasan berikut.

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor awal yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan karena berkaitan dengan penyampaian informasi kepada seluruh pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPM-Desa Provinsi Jawa Barat telah menerapkan komunikasi secara berjenjang melalui pemerintah kabupaten/kota sebelum diteruskan kepada pemerintah desa. Penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisasi, Zoom Meeting, video tutorial, aplikasi Tapal Desa, komunikasi telepon, serta *contact person* pada setiap kabupaten/kota.

Pemanfaatan berbagai media komunikasi tersebut memperlihatkan adanya adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi sehingga proses penyampaian kebijakan menjadi lebih cepat dan fleksibel. Selain itu, keberadaan *contact person* membantu memperlancar koordinasi

antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota maupun desa.

Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan tidak lagi bergantung pada pertemuan tatap muka, tetapi telah beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Meskipun demikian, efektivitas komunikasi masih dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam memahami serta menindaklanjuti informasi yang diterima. Dengan demikian, keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya saluran informasi, tetapi juga oleh kapasitas pelaksana dalam mengimplementasikan informasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi SDGs Desa Goal 9 telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pemahaman dan tindak lanjut informasi oleh pelaksana kebijakan.

2) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi SDGs Desa Goal 9 juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPM-Desa Provinsi Jawa Barat telah memiliki pembagian tugas berdasarkan kompetensi antarperangkat daerah. Aspek administratif dikelola oleh DPM-Desa, sedangkan aspek teknis pembangunan dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis seperti Dinas Bina Marga dan PUPR. Selain itu, pemerintah desa bersama masyarakat dilibatkan melalui mekanisme swadaya dan gotong royong sehingga pelaksanaan pembangunan tidak hanya bertumpu pada pemerintah.

Dari sisi informasi, pelaksana memperoleh dukungan melalui berbagai media komunikasi serta pendampingan teknis ketika diperlukan. Pembagian kewenangan antarinstansi juga telah diatur secara jelas sehingga mengurangi potensi tumpang tindih pelaksanaan program.

Namun demikian, implementasi masih menghadapi keterbatasan fasilitas berupa anggaran pembangunan yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan infrastruktur desa. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah harus menetapkan prioritas pembangunan secara bertahap

dan lebih berorientasi pada pemerataan kuantitas dibandingkan peningkatan kualitas pembangunan. Selain itu, masih terdapat disparitas pembangunan antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan keterbatasan sumber daya pembangunan.

3) Disposisi

Disposisi berkaitan dengan komitmen dan sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SDGs Desa Goal 9 didukung oleh pembentukan tim pelaksana yang melibatkan berbagai bidang sesuai kebutuhan program. Pada tingkat desa juga dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang melibatkan unsur masyarakat sehingga memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, pemerintah memberikan insentif berupa tambahan penghasilan yang terintegrasi dalam bantuan keuangan desa. Insentif tersebut disertai dengan kewajiban pelaporan kinerja sehingga mendorong peningkatan akuntabilitas aparatur desa.

Di samping itu, penelitian menemukan bahwa keberlanjutan implementasi masih dipengaruhi oleh perubahan arah kebijakan akibat pergantian kepemimpinan daerah. Perubahan prioritas pembangunan berdampak pada penyesuaian program yang telah direncanakan sebelumnya sehingga kontinuitas implementasi belum sepenuhnya terjaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen politik tetap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan implementasi SDGs Desa Goal 9.

4) Struktur Birokrasi

Implementasi SDGs Desa Goal 9 didukung oleh struktur birokrasi yang telah memiliki standar operasional prosedur melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2025, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.343-DPM-Desa/2025, dan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan desa. Regulasi tersebut memberikan pedoman yang jelas mengenai tahapan administrasi mulai dari perencanaan, verifikasi, validasi, hingga pencairan bantuan.

Selain SOP, implementasi juga melibatkan berbagai organisasi seperti DPM-Desa, BPKAD, perangkat daerah teknis, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta Inspektorat. Pembagian tugas tersebut menunjukkan adanya fragmentasi birokrasi yang tinggi, namun masih dapat berjalan melalui koordinasi lintas sektor yang dilakukan secara berkelanjutan. Walaupun demikian, keterlibatan banyak lembaga memerlukan sinkronisasi yang kuat agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi maupun keterlambatan pelaksanaan program. Oleh karena itu, koordinasi menjadi faktor utama dalam menjaga efektivitas implementasi kebijakan.

Berdasarkan keempat variabel implementasi kebijakan George C. Edward III, implementasi SDGs Desa Goal 9 dalam pembangunan infrastruktur dan inovasi perdesaan di DPM-Desa Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Keberhasilan implementasi didukung oleh adanya regulasi yang jelas, mekanisme komunikasi yang berkembang melalui digitalisasi, pembagian kewenangan antarinstitusi, serta koordinasi lintas sektor.

Namun demikian, implementasi masih menghadapi beberapa tantangan, yaitu keterbatasan anggaran pembangunan, disparitas pembangunan antarwilayah, perbedaan kapasitas pemerintah desa, serta perubahan prioritas pembangunan akibat dinamika kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting untuk mendukung pencapaian SDGs Desa Goal 9 secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi SDGs Desa Goal 9 dalam pembangunan infrastruktur dan inovasi perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, implementasi SDGs Desa Goal 9 telah

didukung oleh aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pada aspek komunikasi, implementasi kebijakan telah didukung oleh mekanisme penyampaian informasi secara berjenjang melalui pemerintah kabupaten/kota serta pemanfaatan berbagai media komunikasi digital seperti Zoom Meeting, video tutorial, aplikasi, dan *contact person*. Meskipun demikian, efektivitas komunikasi masih dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam memahami dan menindaklanjuti informasi kebijakan.

Pada aspek sumber daya, implementasi telah didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, pembagian kewenangan antarinstansi, bantuan keuangan, serta sistem administrasi yang mendukung pelaksanaan program. Namun, keterbatasan anggaran, kapasitas teknis, dan tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur menyebabkan pelaksanaan program belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan desa secara merata.

Pada aspek disposisi, implementasi didukung oleh komitmen pelaksana melalui pembentukan tim kerja, keterlibatan masyarakat, dan pemberian insentif bagi aparatur desa. Akan tetapi, keberlanjutan program masih dipengaruhi oleh perubahan prioritas pembangunan akibat dinamika kepemimpinan daerah yang dapat memengaruhi konsistensi arah kebijakan.

Pada aspek struktur birokrasi, implementasi telah berjalan dengan dukungan regulasi, standar operasional prosedur, serta pembagian tugas antarinstansi sesuai kewenangan masing-masing. Namun, keterlibatan berbagai aktor dalam pelaksanaan program membutuhkan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat agar fragmentasi birokrasi tidak menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Secara keseluruhan, implementasi SDGs Desa Goal 9 dalam pembangunan infrastruktur dan inovasi perdesaan di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa aspek kelembagaan dan administratif telah tersedia dengan baik, tetapi masih menghadapi tantangan pada aspek kapasitas sumber daya, keberlanjutan kebijakan, serta pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi memerlukan penguatan

koordinasi, stabilitas kebijakan, dan pendekatan pembangunan yang lebih berorientasi pada pencapaian indikator SDGs Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Unpad Press.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., . . . Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Jumroh, & Pratama, Y. J. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*. Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Indonesia: Insan Cendekia Mandiri.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit ALFABETA.

Dokumen

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.343-DPM-Desa/2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025.

Website

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. (2026, April 4). *Profil DPMDesa Jabar*. Retrieved from Situs Resmi DPMDesa Provinsi Jawa Barat: <https://dpmdesa.jabarprov.go.id>

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2026, February 11). *Pencarian Data Profile: SKOR SDGS DESA*. Retrieved from Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa: <https://sid.kemendesa.go.id>